



## Implementasi PERMENDES PD TT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun

Muh. Fachri Arsjad <sup>1\*</sup>; Muhammad Syukran <sup>2</sup>; Sarfan Tabo <sup>3</sup>; Ahlar Biongan <sup>4</sup>; Muten S. Nuna<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Gorontalo; [mfarsjad@gmail.com](mailto:mfarsjad@gmail.com)

<sup>2</sup> STAI YPIQ Baubau; [muhammadsyukran080@gmail.com](mailto:muhammadsyukran080@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Gorontalo; [sarfandjtabo@gmail.com](mailto:sarfandjtabo@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Gorontalo; [ahiarbiongan@gmail.com](mailto:ahiarbiongan@gmail.com)

<sup>5</sup> Universitas Gorontalo; [mutensnuna@gmail.com](mailto:mutensnuna@gmail.com)

\* Correspondence: [sarfandjtabo@gmail.com](mailto:sarfandjtabo@gmail.com)

### ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Implementasi, Kebijakan, Indeks Desa Membangun*

Received: : 02 Juni 2024

Revised: : 23 Juni 2024

Accepted: : 03 Juli 2024

### ABSTRAK

Secara umum pedoman indeks desa membangun disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses implementasi Permendes PD TT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun di Kecamatan Bulawa serta faktor-faktor yang menentukan kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode analitis yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi Permendes PD TT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun di Kecamatan Bulawa belum sepenuhnya maksimal dan efektif. Sedangkan, faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa baik dimensi sosial, dimensi ekologi dan dimensi ekonomi belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal.

Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango perlu memaksimalkan pencapaian program dalam menaikkan status desa sebagai wujud dari keberhasilan implementasi kebijakan, guna meningkatkan indeks desa, serta lebih memaksimalkan peningkatan dimensi sosial, dimensi ekologi, dan dimensi ekonomi, agar dapat mendukung peningkatan status desa di Kecamatan Bulawa.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Indeks Desa Membangun,

### ABSTRACT

In general, the guidelines for the Village Development Index were prepared to provide guidance to the central, regional and village governments in utilizing data and information on the Village Development Index as a basis

for the process of planning, implementing, monitoring and evaluating village development.

This research was conducted to determine the implementation process of PDTT Ministerial Decree Number 2 of 2016 concerning the Development Village Index in Bulawa District as well as the factors that determine government policy in raising village status. This research uses a qualitative descriptive method with an analytical method, namely research that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior.

The results of this research indicate that the implementation process of PDTT Ministerial Decree Number 2 of 2016 concerning the Village Development Index in Bulawa District has not been fully optimal and effective. Meanwhile, the factors that determine the implementation of government policies in raising village status, including the social dimension, ecological dimension and economic dimension, have not been fully implemented optimally.

The recommendation of this research is that it is hoped that the Regional Government of Bone Bolango Regency needs to maximize program achievements in raising village status as a manifestation of successful policy implementation, in order to increase the village index, as well as maximize the improvement of the social dimension, ecological dimension and economic dimension, so that it can support the improvement of village status in Bulawa District.

Keywords: Implementation, Policy, Developing Village Index,

## Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun disebutkan bahwa konsep IDM terintegrasi dari beberapa kategori di dalamnya yang meliputi: Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). (Madjid, 2020) Dari ketiga faktor tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi dalam proses pengukuran strata kemandirian dan kemajuan suatu desa. Indeks desa membangun disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. (Astika & Sri Subawa, 2021)

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah variabel dan indikator. Tujuan khusus penyusunan indeks desa membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa. (Ade Irma Seska Arina, Vecky Masinambow, 2021)

Salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan

utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional, sebagaimana dengan pendapat Dunn (2000 : 109) menyatakan bahwa “pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang atau lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi dan lain-lain. Lebih lanjut dijelaskan

Kecamatan Bulawa merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bone Bolango yang diresmikan pada tanggal 27 April 2007 oleh Bupati Bone Bolango, sehingga secara administrasi, sejak tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2007, dimana telah terjadi pemekaran sejumlah kecamatan di Kabupaten Bone Bolango yang berdampak pada berubahnya letak administrasi desa terhadap kecamatan seiring dengan tuntutan otonomi daerah. Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa Klasifikasi Status Desa dalam Peraturan Menteri Desa, (Setyowati, 2019).

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut bahwa seluruh desa yang ada di Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango masuk pada beberapa klasifikasi yang diuraikan dalam klasifikasi status desa tersebut, yaitu berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Pengukuran Status Perkembangan Desa IDM Tahun 2020, dimana dari 9 Desa di Kecamatan Bulawa, terdapat 8 desa berstatus desa berkembang diantaranya, Desa Kaidundu, Desa Mamungaa, Desa Kaidundu Barat, Desa Mopuya, Desa Mamungaa Timur, Desa Bukit Hujau, Desa Pinomontiga, dan Desa Dunggilata, dan 1 desa berstatus desa tertinggal yaitu Desa Patoa. (Bakti, 2018)

Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, khususnya Pemerintah Kecamatan Bulawa terus berupaya mencari konsep maupun strategi dalam meningkatkan status desa, dimana salah satu yang diupayakan adalah mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Bulawa. (Tambunan et al., 2020) Karena, untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa berkembang dan lain sebagainya, dimana masalah penting yang perlu diselesaikan adalah kemiskinan. Kemiskinan disini harus selalu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah daerah. Karena kegagalan dalam menyelesaikan masalah ini akan mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial, ekonomi dan politik di masyarakat, sehingga hal inipun berpengaruh pada usaha pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu hal ini perlu dilakukan pengkajian lebih dalam lagi, agar segala permasalahan di desa mendapatkan solusi yang konkrit mengenai implementasi indeks desa membangun tersebut. (STIT et al., 2018)

Sebagaimana penelitian dari Mohamad Sukarno (2020), dengan judul Analisis Pengembangan Potensi Desa Berbasis Indeks Membangun Desa (IDM), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pemerintahan desa sangat penting, diketahui bahwa Implementasi Kebijakan di 5 Desa Kabupaten Ciamis sudah sesuai prinsip-prinsip yang mendukung implementasi kebijakan program prioritas sebagaimana seperti adanya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan Desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa dan tipologi Desa. (Sari & Oktavianor, 2021) Sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun di Kecamatan Bulawa. (Iftitah & Wibowo, 2022).

### Metode

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analitis. Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2010 : 4) dalam (Adhi Kusumawati, 2019) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer adalah data langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan khusus, data primer ini diperoleh melalui interview guide atau wawancara langsung dengan responden yang berkenaan dengan objek penelitian. Dimana data primer disini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan obyek penelitian, dan Data sekunder yaitu data yang biasanya disusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan geografis, profil kantor, sejarah berdirinya kantor dan lain-lain. Data sekunder yaitu yang lebih dahulu dikumpulkan oleh orang lain diluar penyelidikan sendiri, dimana data hasil yang dimaksud meliputi data-data yang mendukung data primer. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan analisis induktif. Maksudnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan berangkat ke tempat penelitian atau kelapangan untuk mengumpulkan berbagai bukti melalui penelaahan terhadap fenomena kemudian merumuskan teori. Setelah tahap penelitian sudah selesai dilakukan, barulah perlahan hasil penelitian tersebut dikumpulkan, lalu diubah dalam bentuk tertulis. Sehingga nantinya bisa dimasukkan dalam laporan penelitian yang nantinya akan dikaji dan dikorelasikan dengan teori-teori yang disusun mengenai objek yang diteliti.

### Hasil dan Pembahasan

Indeks desa membangun disusun dengan landasan bahwa pembangunan

merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. (Ekawati et al., 2022) Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa temuan tentang proses implementasi Permendes PDTT nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun di Kecamatan Bulawa yaitu sebagai berikut :

### 1) Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus. (Hajratul et al., 2019) Demikian juga di Kabupaten Bone Bolango, khususnya Kecamatan Bulawa yang sejauh ini masih terus berupaya meningkatkan status desa di wilayah kecamatan, melalui perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang tentunya berdasarkan regulasi serta kebijakan yang lahir. (Isakh et al., 2022)

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Aswan Machmud, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian bahwa, sampai dengan saat ini kami dari pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan terus melakukan pengkajian tentang status desa di Kecamatan Bulawa. (Hendrarso et al., 2021) Yang tentunya kami selaku pemerintah selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kebijakan yang ada, karena regulasi yang dijalankan ini juga mempunyai tujuan yang baik terhadap indeks desa membangun. Akan tetapi, dalam pelaksanaan dilapangan pasti ada saja yang menghambat percepatan kenaikan status desa tersebut bahwa:

*“Standar dan tujuan kebijakan dalam menaikkan status desa di Kecamatan Bulawa sudah sesuai dengan misi dari Kementrian Desa RI yang dituangkan dalam sebuah peraturan. Dan kami selaku pemerintah Kecamatan Bulawa sudah menjalankan standard kebijakan di kecamatan, baik mulai dari pemberdayaan masyarakat, pemerataan atau keadilan pelayanan, maupun pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada. Akan tetapi, dalam pelaksanaan dilapangan pasti ada saja yang menjadi penghalangnya, sehingga, apa yang menjadi standar dari regulasi dan tujuan kebijakan belum maksimal terlaksana”.*

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, standar dan tujuan kebijakan dalam menaikkan status desa di Kecamatan Bulawa sudah sesuai dengan Indikator Desa Membangun (IDM) oleh Kementerian Desa Republik Indonesia melalui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Akan tetapi, dalam implementasinya dilapangan, dimana upaya pemerintah kecamatan dalam

menjalankan standar dan kebijakan pemerintah daerah dalam menaikkan status desa belum maksimal, Karena disebabkan oleh kesiapan dari masing-masing desa itu sendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di desa.(Sandag et al., 2022)

Oleh karena itu, menurut penulis bahwa pemerintah desa di Kecamatan Bulawa dalam upaya meningkatkan indeks desa membangun perlu memaksimalkan tupoksinya dalam memajukan desa berdasarkan standar dan kebijakan yang ada, khususnya berupaya mengurangi angka kemiskinan di desa dengan cara memaksimalkan program pemberdayaan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.(Bojonegoro et al., 2023)

## 2) Sumber Daya Kebijakan

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif. Oleh sebab itu, dalam rangka percepatan pembangunan dari daerah yang teralienasi, pemerintah Indonesia melaksanakan tugas dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur dan mengalokasikan dana desa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, termasuk semua desa yang ada di Kecamatan Bulawa.(Fajar et al., 2022)

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Jusri Utiahman, S.Pd selaku Kepala Seksi Trantib bahwa, dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah ke desa melalui pemerintah kecamatan itu sudah sesuai dengan peruntukkan yaitu sebagai operasional dalam membangun desa agar bisa mandiri dalam menyelenggarakan pembangunan di desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sumberdaya (dana) yang dialokasikan melalui dana desa ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa di Kecamatan Bulawa untuk menunjang indeks desa membangun, serta membangun desa agar lebih maju lagi.

*“Dana yang dikucurkan oleh pemerintah daerah untuk Kecamatan Bulawa sudah sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh Desa. Dengan demikian melalui dana desa yang bersumber dari APBN ini diharapkan dapat menunjang program pemerintah desa dalam meningkatkan indeks desa membangun, agar pemerintah desa dapat meningkatkan status desa tersebut”.*

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, sumber dana yang dikucurkan ke kecamatan itu hanya berbentuk operasional saja, karena masing-masing desa sudah memiliki dana sendiri yang dianggarkan melalui APBD maupun dana desa yang sumbernya dari APBN. Sehingga dalam menunjang indeks desa membangun, dimana dikembalikan lagi ke pemerintah desa untuk mengelola dana desa guna memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat.(Fasya et al., 2020)

Oleh karena itu, menurut penulis bahwa dengan adanya sumberdaya (dana) yang dialokasikan melalui dana desa ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa di Kecamatan Bulawa untuk menunjang indeks desa membangun, serta membangun desa agar lebih maju lagi.

### 3) Aktivitas Pengamatan

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional dimana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten. Demikian juga di Kecamatan Bulawa, dimana aktivitas pengamatan ini dilakukan sesuai prosedur yang ada, yaitu baik melalui teknologi informasi dan komunikasi, serta melibatkan beberapa unsur organisasi yang ditugaskan untuk mengawasi program yang dijalankan di desa dalam rangka meningkatkan indeks desa membangun. (Tabo et al., 2022)

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Lili Prawaty Abas, S.Sos selaku Camat Bulawa bahwa, aktivitas pengamatan terhadap program pembangunan desa di Kecamatan Bulawa dilakukan dengan baik sesuai prosedur yang dijalankan di kecamatan, dimana dengan menggunakan ITE di beberapa wilayah desa dapat menunjang tugas pemerintah kecamatan dalam mengamati program yang dijalankan di desa. Hal ini dilakukan agar pemerintah desa dapat melaksanakan program pembangunan dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku, guna meningkatkan status desa itu sendiri. (Madjid, 2020)

“Untuk pengamatan komunikasi di Kecamatan Bulawa sudah menunjang, karena dengan adanya ITE di beberapa wilayah desa, sehingga telah membantu melancarkan informasi dan komunikasi antar pemerintah di Kecamatan Bulawa, agar program pembangunan desa bisa terlaksanakan dengan baik dalam rangka memajukan desa dan masyarakat khususnya dalam meningkatkan status desa itu sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, aktivitas pengamatan terhadap program pembangunan desa di Kecamatan Bulawa dilakukan dengan baik sesuai prosedur yang dijalankan di kecamatan, dimana dengan menggunakan ITE di beberapa wilayah desa dapat menunjang tugas pemerintah kecamatan dalam mengamati program yang dijalankan di desa. Kemudian dalam memaksimalkan pengamatan atas program pembangunan di desa, dilibatkan juga beberapa kelompok di luar pemerintahan seperti kelompok mahasiswa yang aktif dalam mengamati

proses keberhasilan terhadap indeks desa membangun, kemudian ada juga lembaga pendamping desa yang memiliki tupoksi dalam mengawal pembangunan di desa, agar tercapainya pembangunan desa guna memajukan desa serta meningkatkan status desa itu sendiri.

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis bahwa aktivitas pengamatan terhadap program indeks desa membangun di Kecamatan Bulawa telah berjalan dengan baik, dimana hal ini dapat membantu pemerintah dalam melancarkan program pembangunan desa, karena setiap pelaksanaan kegiatannya terus diamati, sehingga pemerintah juga dapat dengan mudah untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dijalankan. (Astika & Sri Subawa, 2021)

#### 4) Karakteristik Pelaksana

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan. (Ade Irma Seska Arina, Vecky Masinambow, 2021)

Pemerintah Kecamatan Bulawa terus berupaya mencari konsep maupun strategi dalam meningkatkan status desa, dimana salah satu yang diupayakan adalah mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Bulawa. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa di dorong untuk bekerja maksimal sesuai dengan tupoksi masing-masing, agar struktur birokrasi baik dari tingkat daerah sampai ke desa dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas berdasarkan SOP dan peraturan yang berlaku.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Lili Prawaty Abas, S.Sos selaku Camat Bulawa bahwa, struktur organisasi atau pelaksana program memiliki kemampuan masing-masing dalam menjalankan tugas maupun kebijakan yang diberikan, sehingga dengan beragam karakteristik yang dimiliki sebagai pelaksana kebijakan dimana Pemerintah Kecamatan Bulawa membangun kerjasama dengan pemerintah desa maupun para pendamping desa di wilayah kecamatan untuk bersama-sama mengawal program baik dari pelaksanaan pembangunan desa hingga memperkuat tingkat pengawasan.

*“Karakteristik struktur birokrasi di wilayah Kecamatan Bulawa sudah menunjang untuk melaksanakan program pembangunan, karena di setiap pemerintahan desa sudah ada tupoksi dari masing-masing aparat desa, akan tetapi dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan pendamping desa, agar dapat meningkatkan indeks desa membangun di wilayah Kecamatan Bulawa”.*



Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, beragam karakter yang dimiliki sebagai pelaksana kebijakan dimana Pemerintah Kecamatan Bulawa terus membangun kerjasama dengan pemerintah desa maupun para pendamping desa di Kecamatan Bulawa untuk bersama-sama mengawal program baik dari pelaksanaan pembangunan desa hingga memperkuat tingkat pengawasan, agar program Pembangunan desa bisa terkoodinir dan laporan juga dapat dipertanggungjawabkan, karena hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan indeks desa membangun di Kecamatan Bulawa.

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis bahwa, dengan beragam karakteristik pelaksana kebijakan tersebut dibutuhkan keseriusan dan kerjasama yang baik antar pelaksana kebijakan, sebab untuk meningkatkan indeks desa membangun sangat diperlukan semangat kerja yang besar dari pemerintah dan masyarakat untuk membangun desa yang lebih maju lagi.

##### **5) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik.**

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (Ekosospol). Pengaruh Ekosospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. (Tambunan et al., 2020)Demikian juga dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik di Kecamatan Bulawa yang sangat kental pengaruhnya dalam upaya meningkatkan pembangunan desa, dimana kondisi masyarakat yang masih jauh dari kesejahteraan, kemudian masih perlu adanya dorongan kepada masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa serta budaya politik yang masih mengarah kepada politik kepentingan, sehingga hal tersebut untuk diselaraskan dengan program peningkatan indeks desa membangun di Kecamatan Bulawa, agar misi untuk memajukan serta menaikkan status desa bisa tercapai dengan baik.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rewis Laki, S.IP.,M.Si selaku Sekretaris Kecamatan Bulawa bahwa, pada prinsipnya kondisi ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Bulawa sudah cukup baik, karena sebagian besar wilayah Kecamatan Bulawa merupakan daerah pesisir, yang notabeneanya sebageian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga dengan mata pencaharian ini sedikitnya menambah penghasilan dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, BUMDes di Kecamatan Bulawa sebagian besar berjalan dengan baik, sehingga banyak membantu untuk peningkatan PADes. Sementara itu, kesadaran sosial dan politik masyarakat semakin tumbuh untuk bersama-sama dengan pemerintah desa bekerja membangun desa yang lebih baik lagi.

*“Kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Bulawa sudah cukup baik untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Dimana sebagian besar ekonomi masyarakat sudah tumbuh, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan serta*

*jalannya program BUMDes yang telah banyak membantu pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi desa, serta semakin tumbuhnya kesadaran sosial dan politik masyarakat untuk membangun desa dalam upaya menaikkan indeks desa membangun di Kecamatan Bulawa”.*

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, pada prinsipnya kondisi ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Bulawa sudah cukup baik, karena sebagian besar wilayah Kecamatan Bulawa merupakan daerah pesisir, yang notabeneanya sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga dengan mata pencaharian ini sedikitnya menambah penghasilan dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, selanjutnya BUMDes di Kecamatan Bulawa sebagian besar berjalan dengan baik, sehingga banyak membantu untuk peningkatan PADes. Sementara itu, didukung juga dengan kondisi sosial dan politik masyarakat yang sadar untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun desa serta adanya keterwakilan rakyat di DPRD yang selalu memperhatikan kondisi desa dan masyarakat di Kecamatan Bulawa.(STIT et al., 2018)

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis dimana kondisi ekonomi, sosial dan politik di Kecamatan Bulawa dalam upaya meningkatkan indeks desa membangun sudah cukup baik. Akan tetapi hal ini perlu untuk ditingkatkan lagi, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak semua masyarakat desa bermata pencaharian sebagai nelayan yang mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah adalah adanya pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat desa di Kecamatan Bulawa, agar dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada.(Sari & Oktavianor, 2021)

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, telah diperoleh kesimpulan terkait implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun di Kecamatan Bulawa Proses implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun di Kecamatan Bulawa belum sepenuhnya maksimal dan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Kebijakan, Aktivitas Pengamatan, Karakteristik Pelaksana, dan Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik yang dijalankan di desa belum mampu mananggulangi kemiskinan serta meningkatkan ekonomi desa yang tujuannya demi meningkatkan indeks desa membangun di wilayah Kecamatan Bulawa.

## **Referensi**

- Ade Irma Seska Arina, Vecky Masinambow, E. N. W. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/35490>
- Adhi Kusumawati. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. I. Sukarno (ed.); 1st ed.).

Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

- Astika, A. N., & Sri Subawa, N. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232>
- Bakti, H. S. (2018). Identifikasi Masalah Dan Potensi Desa Berbasis Indeks Desa Membangun (Idm) Di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.30741/wiga.v7i1.331>
- Bojonegoro, U., Bojonegoro, U., & Bojonegoro, U. (2023). INCREASING VILLAGE POTENTIAL BASED ON DEVELOPING VILLAGE INDEX IN SIDOMUKTI VILLAGE THROUGH COLLABORATIVE KKN-T OF 4(2), 118–128. <https://doi.org/10.36701/wahatul.v4i2.1072.PENDAHULUAN>
- Ekawati, N., Agustar, A., & Analia, D. (2022). Penggunaan Dana Desa dan Implikasinya terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 185–192.
- Fajar, K. I. D., Rijanta, R., & Kurniawan, A. (2022). Eksplorasi Variabel Pembangunan Berkelanjutan untuk Indeks Desa Membangun Pulau Jawa. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(1), 68. <https://doi.org/10.22146/mgi.73056>
- Fasya, M. N., Prayitno, G., & Subagiyo, A. (2020). Hubungan kemiskinan dan indeks desa membangun di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. *Planning for Urban Region and Environment Volume*, 9(3), 1–10. <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/150>
- Hajratul, D. M., Pratiwi, N. N., Yuniarti, E., Besar, D. J., Sungai, K., Kabupaten, K., & Raya, K. (2019). Analisis Indeks Desa Membangun Desa Jeruju Besar. *Universitas Tanjungpura*, 1–9.
- Hendrarso, P., Handoko, P., Faiz Ali Ramdhani, M., Andayani, N., & Tania, R. (2021). Kajian Pengentasan Desa Tertinggal Melalui Pendekatan Indeks Desa Membangun. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(1), 57–69. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1607>
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 17–36. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>
- Isakh, I. H., Muhafidin, D., & Halimah, M. (2022). Organizational Development of Desa Rancaekek Wetan in. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 13(2), 384–390.
- Madjid, T. dkk. (2020). *Peringkat Indeks Desa Membangun*. 871.
- Sandag, H. A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2022). Analisis Pendapatan Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 94–111.
- Sari, N., & Oktavianor, T. (2021). Indeks Desa Membangun (Idm) Di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 2(1), 36. <https://doi.org/10.20527/jpp.v2i1.2768>

- Setyowati, E. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (Idm): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 9(2), 170–188.  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/5324>
- STIT, M., Kusuma, N., & Purwanti, E. (2018). Village Index Analysis Building to Know The Village Development In Gadingrejo District of Pringsewu District. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 6(02), 179–190.  
<https://doi.org/10.35450/jip.v6i02.96>
- Tabo, S., Nursafitra, M., & Biongan, A. (2022). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Huidu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo* 123 *Universitas Negeri Makassar Gorontalo 4 Universitas Pendahuluan Di negara setiap proses suatu di tentunya untuk dilaksanakan setiap negara b. 2*, 1–14.
- Tambunan, B. H., Sihombing, M., & Harahap, R. H. (2020). Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 9(2), 439–446.  
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3942>